

KINERJA PPID DALAM PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN KARAWANG

Cikal Fairuz Sahara

NPP. 29.0639

Asdaf Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: cikalfsahara@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Dissemination of information that occurs more quickly makes the disclosure of public information in Indonesia an important part in optimizing public supervision in order to realize good governance. PPID Karawang Regency is an institution that plays a very important role in fulfilling public information in Karawang Regency. **Purpose:** This study aims to determine the performance of PPID in fulfilling public information in Karawang Regency. **Method:** This study uses descriptive qualitative methods and the theory of performance indicators according to Agus Dwiyanto. The technique of collecting data interview, observation, and documentation. **Result:** PPID performance in Karawang Regency has not been maximized. However, in some indicators it is said to be quite good. Coordination between the Main PPID and the Assistant PPID in terms of submitting a list of public information creates delays and difficulties in terms of implementation and public information services. **Conclusion:** PPID Karawang Regency is deemed not to have realized services that are in accordance with the purpose of establishing PPID. Service to the community, either directly or through the website, is also still relatively slow due to the lack of information needed at PPID. Also, the cooperation and coordination between the Main PPID and the Supporting PPID have not been seen to actively participate with each other. **Keywords:** Performance; Information; Public Information Disclosure.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyebaran informasi yang terjadi semakin cepat membuat keterbukaan informasi publik di Indonesia menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pengawasan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. PPID Kabupaten Karawang menjadi lembaga yang sangat berperan dalam pemenuhan informasi publik di Kabupaten Karawang. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PPID dalam pemenuhan informasi publik di Kabupaten Karawang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kinerja PPID di Kabupaten Karawang belum maksimal. Namun, dalam beberapa indikator sudah dikatakan cukup baik. Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu dalam hal penyerahan daftar informasi publik membuat keterlambatan serta kesulitan

dalam hal pelaksanaan serta pelayanan informasi publik. **Kesimpulan:** PPID Kabupaten Karawang dirasa belum mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan tujuan dibentuknya PPID. Pelayanan pada masyarakat baik secara langsung maupun lewat *website* juga masih tergolong lambat karena kurang tersedia nya informasi yang dibutuhkan di PPID. Serta Kerjasama dan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu juga belum terlihat berpartisipasi aktif satu sama lain.

Kata kunci: Kinerja, Informasi, Keterbukaan Informasi Publik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara demokrasi, dalam negara demokrasi keterbukaan terhadap informasi publik merupakan hal yang penting dan menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan keadilan untuk seluruh masyarakat. Demi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi maupun partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi publik di Indonesia kini sudah berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik pada setiap praktik pengelolaan negara serta organisasi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan yang prima. Keterbukaan informasi publik saat ini sudah menjadi hak bagi warga negara Indonesia. Hak memperoleh informasi bagi masyarakat sudah menjadi hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kepada warga negara yaitu sebagai hak bagi warga negara. Hak dalam memperoleh informasi ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28 F.

Untuk mendukung terpenuhinya hak keterbukaan informasi publik bagi setiap masyarakat, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang mana di dalamnya disebutkan pemerintah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tujuan yaitu demi mencapai pelayanan yang berkualitas. Disebutkan juga bahwa setiap organisasi pemerintah dan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, hal ini tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010.

Hadirnya PPID Kabupaten Karawang yang berfungsi sebagai jembatan dalam pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat Kabupaten Karawang memiliki peranan sebagai sarana bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang tepat dan baik agar terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan publik. Informasi dari semua badan publik merupakan informasi yang tidak hanya milik badan publik atau pemerintah tetapi juga milik rakyat dan rakyat perlu memiliki akses terhadap informasi publik

PPID Kabupaten Karawang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus mendukung pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai pemenuh hak keterbukaan informasi publik bagi masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Masih terdapat banyak masyarakat yang bahkan belum mengetahui serta belum memanfaatkan hak keterbukaan informasi publik. Kita ketahui sendiri hak tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk pemanfaatan secara pribadi maupun untuk lingkungan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan hak keterbukaan informasi publik juga membuat masyarakat menjadi kurang ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan maupun proses pembuatan kebijakan publik. Terdapat juga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui akan hadirnya PPID sebagai salah satu pintu utama penyelenggaraan serta penyediaan informasi publik. Hal ini sangat disayangkan mengingat peran PPID yang sangat krusial dalam penyebaran maupun penyediaan informasi publik.

Sebagai sarana utama penyedia layanan informasi publik, PPID Kabupaten Karawang juga memiliki website agar mempermudah pelayanan permohonan informasi publik bagi masyarakat, ppid.karawangkab.go.id menjadi salah satu media bagi masyarakat untuk melakukan permohonan informasi publik ke PPID Kabupaten Karawang. Terlihat di portal web PPID Kabupaten Karawang yaitu ppid.karawangkab.go.id, informasi yang tersedia masih sedikit dan belum lengkap. Hal ini dapat kita bandingkan dengan portal web PPID Kota Bandung yaitu ppid.bandung.go.id yang sudah lengkap dan lebih banyak menyediakan informasi publik bagi masyarakat. Kurangnya ketersediaan informasi pada portal web PPID Kabupaten Karawang juga dipengaruhi oleh kurang lengkapnya ketersediaan data pada PPID Kabupaten Karawang itu sendiri, sehingga informasi yang seharusnya di unggah ke portal web PPID dan menjadi konsumsi publik tidak tersedia.

Beberapa hal tersebut tentunya dipengaruhi juga oleh kinerja dari PPID juga kurangnya sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik maupun mengenai PPID kepada masyarakat, sehingga terjadilah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai PPID di Kabupaten Karawang. Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik ini harus diperbaiki agar tercapainya pengelolaan serta pelayanan informasi yang berkualitas, cepat, mudah dan ringan biaya. Serta untuk meningkatkan kualitas kinerja badan publik maupun pemerintah menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Desti Miranda yang berjudul Kinerja Diskominfo Kabupaten Ketapang Dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Informasi Publik pada Tahun 2019 menemukan bahwa kinerja tim PPID dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik masih belum optimal dikarenakan salah satunya yaitu terhambat pada kendala *website* yang tidak aktif sejak tahun 2018 (Desti Miranda, 2019). Penelitian Khairul Fikri yang berjudul Peran PPID dalam pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Provinsi Riau pada Tahun 2020 menemukan bahwa peran PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi sudah optimal namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi diantaranya ialah masalah pada pelayanan informasi yaitu masih sedikitnya pemohon informasi di PPID yang dikibatkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PPID dan juga kendala lainnya ialah terdapat ketidakpuasan pemohon informasi dalam menerima jawaban informasi (Khairul Fikri, 2020). Penelitian Ira Novita yang berjudul Peranan PPID Diskominfo dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada Tahun 2019 menemukan bahwa PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh berperan sebagai Administrator, Fasilitator, Operator, Sistem Informasi dan Evaluator dalam hal pelayanan informasi publik. Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi pada penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai informasi publik dan masih kurangnya Kerjasama antar PPID dengan staf bagian masing-masing (Ira Novita, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas mengenai kinerja PPID dalam pemenuhan informasi publik. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Agus Dwiyanto (2008) yang menyatakan bahwa penilaian kinerja dapat diukur melalui 6 indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja PPID dalam pemenuhan informasi publik di Kabupaten Karawang

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan metode deskriptif yaitu bentuk metode yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 10 orang informan yang terdiri dari kepala Diskominfo Kabupaten Karawang (1 Orang), Kabid PIP Diskominfo Kabupaten Karawang (1 Orang), Kepala seksi data pengaduan dan pelaporan informasi Diskominfo Kabupaten Karawang (1 Orang), Staff Diskominfo Kabupaten Karawang (1 Orang), Pengelola website PPID Kabupaten Karawang (1 Orang), serta Sample Masyarakat sejumlah 5 Orang. Adapun pemilihan informan ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Adapun analisisnya menggunakan teori Indikator Kinerja Agus Dwiyanto (2008) yang menyatakan bahwa penilaian kinerja dapat diukur melalui 6 indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja PPID dalam pemenuhan informasi publik di Kabupaten Karawang menggunakan pendapat dari Agus Dwiyanto (2008) yang menyatakan bahwa penilaian kinerja dapat diukur melalui 6 indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Produktivitas

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam lingkup lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sejauh ini belum memperlihatkan capaian kinerja sebagai lembaga pemenuh informasi publik yang baik dan sesuai dengan tujuan dibentuknya PPID. Menurut hasil observasi penulis, PPID Kabupaten Karawang sejauh ini sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai SOP Layanan Informasi PPID Kabupaten Karawang. PPID Kabupaten Karawang sendiri telah melaksanakan tugas dan kewajiban yaitu mengkoordinasikan, melaksanakan, maupun merencanakan selalu segala hal dalam pengumpulan data maupun informasi publik yang dikumpulkan dari PPID Pembantu di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Karawang.

Hasil yang belum maksimal terlihat pada koordinasi kerja dan kerjasama antara PPID Utama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau PPID Pembantu dalam menghasilkan, menyerahkan dan mengelola data maupun informasi publik. PPID Pembantu seharusnya secara rutin membuat suatu daftar yang berisi data maupun informasi publik dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah atau biasa disebut Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditujukan untuk pelayanan informasi yang diberikan kepada PPID Utama secara berkala dan akan digunakan dalam memenuhi permohonan informasi publik bagi masyarakat. Daftar data dan informasi publik tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab PPID Pembantu kepada PPID Utama yang diberikan secara berkala.

Minimnya partisipasi PPID Pembantu dalam pemberian daftar data dan informasi masing-masing perangkat kepada PPID Utama mengakibatkan sulitnya PPID Utama dalam memberikan informasi

publik kepada masyarakat. Keterlambatan pemberian informasi publik pun terjadi, hal ini sangat berpengaruh pada kinerja PPID yang seharusnya menjadi lembaga penyedia informasi publik yang baik.

3.2. Kualitas Layanan

Disimpulkan bahwa 8 dari 10 masyarakat yang pernah melakukan permohonan informasi publik kepada PPID mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan PPID sudah baik. Dimana 8 dari 10 orang tersebut mengatakan pelayanan dari petugas PPID sudah cepat dan tepat. Masyarakat mengatakan bahwa petugas PPID handal dalam hal pelayanan. Petugas PPID memiliki akses sarana dan prasarana yang mumpuni saat pelayanan. Pemberian informasi publik kepada masyarakat pun dilakukan dengan cepat, tepat serta ramah dan sopan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis selama penelitian, masih ditemukannya proses pemberian informasi oleh petugas kepada pemohon informasi juga mengalami kendala diantaranya yaitu keterlambatan pemberian informasi kepada masyarakat. Ketidaktepatan waktu dalam pemberian informasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi publik yang tersedia di PPID Utama.

3.3. Responsivitas

ketersediaan data dan kelengkapan data serta pembaharuan data masih kurang di PPID Kabupaten Karawang. Hal ini juga dibuktikan dengan ketersediaan serta jumlah informasi di Laman PPID Kabupaten Karawang yaitu ppid.karawangkab.go.id belum ada menunjukkan update terbaru. Sebagai contoh di masa pandemi ini masyarakat tentunya membutuhkan data-data serta berita mengenai Covid-19 namun yang ditampilkan pada laman PPID Kabupaten Karawang tersebut hanya sedikit info mengenai Covid-19.

3.4. Responsibilitas

PPID memiliki sistem kerja struktural yang seharusnya berorientasi kepada prinsip dasar administrasi. Sistem kerja struktural yang dimaksud antara lain kerjasama dan koordinasi antara PPID Utama dengan para Organisasi Perangkat Daerah atau PPID Pembantu sesuai dengan SOP Layanan Informasi. Mengenai penyerahan DIP dari OPD kepada PPID Utama ialah masih kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan OPD Terkait. Untuk itu PPID Utama harus lebih memperhatikan dan menghimbau kepada OPD terkait agar lebih berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai PPID Pembantu.

3.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau kondisi yang membutuhkan tanggungjawab. Dalam suatu organisasi pertanggungjawaban merupakan hal yang seharusnya ada dan memiliki kaitan erat dengan berjalannya organisasi dalam mencapai tujuan. Pada penelitian ini OPD sudah menyerahkan daftar informasi publik kepada PPID Utama namun informasi yang diberikan tidak lengkap serta diberikannya informasi tidak secara berkala. Hasil observasi penulis juga menunjukkan bahwa PPID Utama maupun PPID Pembantu belum memiliki akuntabilitas dalam penyelenggaraan koordinasi untuk memenuhi kebutuhan informasi publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pihak OPD maupun PPID Utama sangatlah penting agar masing-masing pihak bertanggungjawab pada kewajibannya dalam pemenuhan informasi publik.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian yang membahas mengenai kinerja PPID dalam pemenuhan informasi publik di Kabupaten Karawang ini penulis menemukan bahwa kinerja PPID Kabupaten Karawang belum

sepenuhnya optimal. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah seperti pada penelitian Desti Miranda pada tahun 2019 yaitu disebutkan bahwa *website* PPID sudah tidak aktif sejak 2018, sedangkan PPID Karawang memiliki *website* yang aktif hingga saat ini namun terkendala pada informasi dan konten yang tersedia di *website* tersebut yang belum *terupdate* secara berkala. Selanjutnya pada penelitian Khairul Fikri pada tahun 2020 ditemukan bahwa banyaknya ketidakpuasan pada pelayanan PPID, berbeda dengan PPID Karawang yang menunjukkan hasil yang baik dalam pelayanan PPID kepada masyarakat, ditunjukan dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa masyarakat puas dengan pelayanan dari petugas PPID yang cepat, tepat, serta ramah terhadap pemohon informasi.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa PPID Kabupaten Karawang yang memiliki tugas sebagai penyedia utama layanan informasi publik untuk masyarakat Kabupaten Karawang dirasa belum terlihat sesuai sebagaimana dengan tujuan dibentuknya PPID, yaitu dibentuknya PPID bertujuan untuk terwujudnya pelayanan yang senantiasa cepat, tepat dan berkualitas serta memberikan pelayanan informasi yang mudah bagi masyarakat. Pelayanan pada masyarakat mengenai permohonan informasi publik seperti melalui laman resmi PPID Kabupaten Karawang masih tergolong lambat dikarenakan masih kurang tersedia informasi yang dibutuhkan di PPID, data yang tersedia di laman resmi juga kurang informatif dan kurang *terupdate*. Kerja sama atau koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu dinilai masih belum terlihat berpartisipasi aktif satu sama lain dalam pelayanan dan pemenuhan informasi publik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Agus Dwiyanto.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja PPID Kabupaten Karawang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karawang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Davis, Gordon B. 1991. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Pustaka Binamas Pressindo.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. 3rd ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko, Widodo Suparno. 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harbani, Pasolong. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.

Miles, B. Matthew, and Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP.

Moeherton. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Moelong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rianto, Adi. 2010. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit.

Subagiyo, Henri. 2009. Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat.

Sudarmanto. 2009. Kinerja Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.

Tugiman, Hiro. 1996. Pengenalan Internal Audit. Kanisius.

Wibowo. 2009. Manajemen Kinerja. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua Pasal 28F

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

C. Jurnal

Fikri, Khairul. 2020. "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau".

Ira Novita. 2019. "Peranan PPID Diskominfo Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh".

Miranda Desti. 2019. "Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ketapang Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik".

D. Sumber Bacaan dari Internet dan Sumber Lainnya

Karawang dalam angka. 2020. "Kabupaten Karawang Dalam Angka 2020".
<https://ppid.bandung.go.id/> Website PPID Kota Bandung. Diakses pada 10 September 2021

<https://ppid.karawangkab.go.id/> Website PPID Kabupaten Karawang. Diakses pada 10 September 2021

Buku Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2020 PPID Kabupaten Karawang.

Buku Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2021 PPID Kabupaten Karawang.

Kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2021/2022

